

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU NELAYAN KOTA AMBON

(Effectiveness of Fisfermen Card Policies in Ambon City)

Meike Tiven¹, N. V. Huliselan², Y. Lopulalan³

¹Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-Pulau Kecil, Pascasarjana Unpatti

²Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti

³Program Studi Agribisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti

mtv150579@gmail.com

ABSTRAK : Kartu Nelayan adalah Kartu Identitas Nelayan yang dapat membuktikan identitas diri sebagai nelayan. Kartu Nelayan merupakan syarat utama untuk nelayan dapat mengakses program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk nelayan. Program pemerintah tersebut antara lain Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, Pemberian BBM bersubsidi dan Permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektifitas, dampak dan manfaat serta kebijakan pemberian program Kartu Nelayan. Penelitian dilakukan di Desa Latuhalat, Desa Eri dan Desa Galala, Kota Ambon. Metode analisa data yang digunakan adalah (1) Metode Analisis Trend, (2) Analisis Content/Analisis Isi, (3) Analisis Statistik Deskriptif, dan (4) Analisis Jalur. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kartu nelayan untuk Kota Ambon tahun 2011-2018 berjumlah 1.176 orang atau 19,52% dari jumlah nelayan di Kota Ambon. Manfaat kartu nelayan di Kota Ambon antara lain telah diserahkan bantuan sarana prasarana tahun 2015-2017 berjumlah 55 buah, nelayan telah memiliki asuransi nelayan yang berjumlah 1.002 jiwa, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan berjumlah 140 bidang tanah. Selain itu, alokasi subsidi BBM dari Pertamina melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebanyak 70 ton setiap bulan dalam setahun. Rumusan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan kartu nelayan di kota Ambon diperoleh hubungan kausalitas dan koefisien parameter antara Nelayan dengan Efektivitas Kebijakan sebesar 63%, Pemerintah dengan Efektivitas kebijakan sebesar 72%, Pemerintah dengan Nelayan sebesar 75%, Pemerintah dengan *Stakeholders* sebesar 84%, dan *Stakeholders* dengan Efektivitas Kebijakan sebesar 51 %.

Kata Kunci : efektivitas, kartu nelayan, kebijakan, Kota Ambon, program nelayan

ABSTRACT : Fisherman card is the identity card of fisherman in which the fisherman can prove his identity as a fisherman. The card is also the main requirement for the fisherman to access programs that issued by government. Those programs from the government such as fisherman insurance program, SeHAT fisherman program, provision of fishing facilities and infrastructure for fisherman. Provision of subsidized fuel oil and capital were given to fisherman that corporate with bank. The purpose of the study was to analyze the effectiveness, impact, affect, benefits and policies from the programs of provision fisherman card that issued by the government. The research location was conducted in Latuhalat, Eri and Galala villages in Ambon city. Data were analysed by using (1) trend analysis method, (2) content analysis, (3) descriptive statistic analysis, and (4) path analysis. The results showed that there were 1.176 or 19,52%. The impact of using fisherman cards in Ambon city such as like 55 facilities and infrastructures given to the fisherman, 1.002 fisherman who have already got insurance, there were 140 certificates of rights to the land of fisherman. Additionally, Pertamina has allocated 70 tons of fuel every month in a year. The policy formulation to increase the effectiveness of fisherman card policies in Ambon city obtained a

causality and parameter coefficient relationship between Fishermen with Policy Effectiveness of 63%, Government with a Policy Effectiveness of 72%, Government with Fishermen at 75%, Government with Stakeholders at 84%, and Stakeholders with Policy Effectiveness of 51%.

Keywords : effectiveness, card of fisherman, policies, Ambon City, fisherman program

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional 2011, jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 % dari jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia yang berjumlah 31,02 juta orang. Total jumlah nelayan miskin tersebut terdiri dari 10.600 desa nelayan miskin yang berada pada semua wilayah pesisir di Indonesia (BPS, 2011). Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan belum berdampak secara optimal terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan. Kemiskinan nelayan ini sangat berkaitan dengan kondisi sumberdaya perikanan, kualitas sumberdaya manusia, sarana prasarana dan fasilitas akses terhadap modal, teknologi dan pasar (Yafiz, M., dkk. 2009). Rustiadi (2001) dalam Abdurrahman, A, dkk., (2008) mengemukakan banyaknya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh nelayan mengalami ketidakpastian (*uncertainty*) dan sangat tergantung pada alam serta fasilitas yang tidak memadai. Hal ini yang mengakibatkan *stakeholders* seperti perbankan dan perusahaan asuransi sulit memberikan pinjaman modal bagi nelayan untuk membantu modal kerja, serta tidak ada jaminan keselamatan kerja di laut. Selain itu yang menjadi akar kemiskinan nelayan adalah ketergantungan yang tinggi dan dominan terhadap kegiatan penangkapan. Tetapi apabila ada kebijakan pemberdayaan lain untuk nelayan maka ketergantungan tersebut bisa berkurang baik di sektor perikanan maupun sektor lainnya, sehingga dapat menguatkan daya tahan nelayan dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi yang cukup tinggi (Zuriat, 2016).

Kusnadi (2002), mengemukakan penyebab utama timbulnya kemiskinan pada masyarakat nelayan yaitu kurangnya program kebijakan pembangunan di kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang berorientasi di antara para pelaku pembangunan, memacu pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan kawasan pesisir nelayan secara berkelanjutan, masalah ketertinggalan masyarakat nelayan karena letak geografis desa nelayan, sehingga mempersulit akses ekonomi, sosial dan budaya. Lambatnya laju dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan, serta keterbatasan modal usaha dan investasi sehingga menyulitkan nelayan dalam pergerakan ekonomi perikanan yang maju. Selain itu, masih adanya sistem pedagang perantara atau lebih dikenal dengan tengkulak sehingga berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan yang rendah yang nantinya berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial nelayan.

Wilayah Provinsi Maluku secara astronomis terletak antara 2° 30' – 8° 30' Lintang Selatan dan 124° 00' – 135° 30' Bujur Timur dengan luas wilayah 712.479,69 Km² terdiri dari 666.139,85 Km² lautan (93,5%). Provinsi Maluku memiliki jumlah nelayan sebanyak 190.780 orang dan Kota Ambon sendiri memiliki jumlah nelayan sebanyak 6.022 orang atau sekitar 3.15 % dari total jumlah nelayan. Nelayan di Kota Ambon yang sudah terdaftar di data base Aplikasi PUPI dan yang memiliki Kartu Nelayan sebanyak 1.168 orang dari tahun 2011–2018 atau hanya sekitar 19.39% dari jumlah nelayan di Kota Ambon.

Kartu Nelayan adalah Kartu Identitas Nelayan yang membuktikan identitas diri sebagai nelayan. Kartu Nelayan diterbitkan pada tahun 2011 oleh Kementerian Kelautan dan

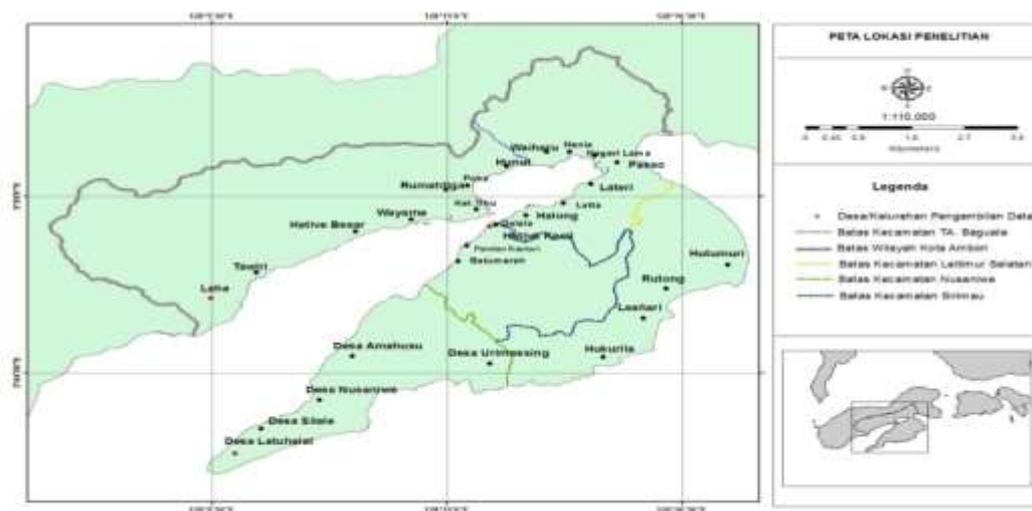
Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Dirjen PUI). Kartu nelayan bermanfaat bagi nelayan, karena dapat digunakan sebagai Identitas Nelayan. Kartu Nelayan merupakan syarat utama untuk nelayan dapat mengakses program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk nelayan antara lain Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, Pemberian BBM bersubsidi dan Permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Pemerintah juga dapat memperoleh informasi tentang data nelayan di seluruh Indonesia (*by name, by address*) melalui Kartu Nelayan.

Efektivitas Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Ambon diharapkan mampu menjawab semua permasalahan masyarakat nelayan. Kartu Nelayan dengan begitu banyak manfaat untuk nelayan ternyata belum dirasakan sepenuhnya oleh nelayan dan belum dimiliki oleh sebagian besar nelayan, pemanfaatan Kartu Nelayan belum maksimal dan semua kebijakan yang dikeluarkan dalam penggunaan Kartu Nelayan belum diketahui oleh nelayan. Manfaat Kartu Nelayan bukan saja dirasakan oleh nelayan tetapi juga Pemerintah dan *stakeholders* lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Program Kartu Nelayan; (2) Menganalisis Efektivitas Program Kartu Nelayan di Kota

Ambon; (3) Menganalisis dampak dan manfaat Program Kartu Nelayan bagi nelayan; (4) Merumuskan Kebijakan Pemberian Kartu Nelayan yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Oktober-Nopember 2017, berlokasi di Desa Latuhalat, Desa Eri dan Desa Galala. Data diperoleh dari hasil wawancara, verifikasi, pengamatan lapangan, studi pustaka dan penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan Metode Analisa Trend untuk Program Kartu Nelayan. Analisis trend adalah analisa yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu yang cukup panjang. Analisa trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang datang. Dalam penelitian ini analisa trend dipakai untuk menganalisa program Kartu Nelayan yang telah sejak tahun 2011. Hasil data dari analisa trend disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Metode Analisa Kontent untuk menganalisa Efektivitas Program Kartu Nelayan. Metode Analisa Statistik Deskriptif untuk menganalisa Dampak Program Kartu Nelayan. Metode Analisa Jalur untuk menganalisa Rumusan Kebijakan Program Kartu Nelayan.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Untuk menganalisis Peran Kartu Nelayan dalam mendukung usaha perikanan tangkap dibutuhkan data statistik berupa data kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui hubungan yang disebabkan oleh pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen, mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam suatu model kausal, menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah dirumuskan dengan menggunakan aplikasi Lisrel (Linear Structural Relationship) versi 8.80. Dalam penelitian ini yang tergolong dalam Latent Variabel adalah: Nelayan (N), Pemerintah (P) dan Stakeholder (S). Sedangkan yang tergolong Observed Variabel adalah: Identitas Nelayan (X1) Permodalan (X2), Rekomendasi BBM (X3), Asuransi Nelayan (X4), SeHat Nelayan (X5), Bantuan Sarana Prasarana (X6), Data Nelayan (X7), Program Bantuan Sarpras (X8), Program Asuransi Nelayan (X9), Program SeHat Nelayan (X10), Rekomendasi BBM Bersubsidi (X11), Kantor Pertanahan (ATR/BPN) (X12), PT. Pertamina (X13), PT. Yasindo (X14), dan Perbankan (X15).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Nelayan

Program Kartu Nelayan telah dilaksanakan sejak tahun 2011-2018 pada semua provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Maluku. Kartu nelayan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sebanyak 22.326 buah dan untuk Kota Ambon sebanyak 1.176 buah (Tabel 1). Jumlah kartu nelayan yang diinput paling rendah pada tahun 2011 yaitu 0 atau tidak ada sama sekali, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 program kartu nelayan baru diluncurkan dan disosialisasikan oleh semua kabupaten/kota termasuk kota Ambon sehingga nelayan belum terdaftar dalam aplikasi PUPI KKP RI. Sedangkan jumlah kartu nelayan tertinggi ada pada tahun 2016, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2016 kartu nelayan dijadikan salah

satu syarat utama bagi nelayan untuk memperoleh semua bantuan dari pemerintah baik itu berupa proposal kelompok nelayan untuk mendapatkan sarana dan prasarana, rekomendasi BBM bersubsidi, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, permodalan dari perbankan nelayan diwajibkan untuk melampirkan Kartu Nelayan. Kartu Nelayan dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Dirjen PUPI) dan nelayan yang terinput pada aplikasi PUPI adalah nelayan penangkapan.

Tabel 1. Jumlah Kartu Nelayan di Kota Ambon Tahun 2011–2018

No	Tahun	Jumlah kartu nelayan
1	2011	0
2	2012	50
3	2013	297
4	2014	71
5	2015	225
6	2016	353
7	2017	179
8	2018	1
Jumlah		1.176

Sumber : Data Aplikasi PUPI KKP RI

Efektifitas Program Kartu Nelayan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 tahun 2016 Bab III memuat tentang Bentuk dan Masa Berlaku Kartu Nelayan, pada pasal 4 ayat 1 kartu nelayan memuat informasi tentang: Nomor Induk Nelayan, Nama Nelayan, Alamat Nelayan, Nomor induk kependudukan (NIK), Status dikapal, Masa berlaku kartu nelayan, Tanda tangan nelayan, Kode bar (barcode) dan Foto nelayan. Nomor induk nelayan yang terdapat pada kartu nelayan memuat informasi tentang: Kode domisili nelayan (provinsi dan kabupaten/kota), Tahun pembuatan kartu nelayan, dan Nomor urut kartu nelayan.

Kartu nelayan sendiri berwarna biru, tampilan kartu nelayan memuat informasi: Nama Nelayan, Nomor Induk Kependudukan, Alamat nelayan (Kecamatan/Desa), Nama NIP

dan Tanda tangan masing-masing Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, Kode Bar (Barcode), Nomor Induk Nelayan, Masa berlaku kartu nelayan.

Berdasarkan Aplikasi PUPI KKP RI form F1 yang harus diisi memuat data tentang nelayan antara lain:

1. Provinsi
2. Kabupaten
3. Kecamatan
4. Desa
5. Nama Nelayan
6. Nomor Induk Kependudukan
7. Jenis kelamin : (Laki-laki/Perempuan)
8. Tempat dan tanggal lahir
9. Golongan Darah
10. Nelayan PUD
11. Alamat Ringkas
12. Status Perkawinan: (Belum kawin/kawin)
13. Status dalam keluarga: (Kepala Keluarga/Anak/Menantu)
14. Jumlah anggota keluarga: Orang
15. Jumlah tanggungan : ... orang
16. Pendidikan Terakhir:
 - Tidak tamat SD
 - SD sederajat
 - SLTP sederajat
 - SLTA sederajat
 - Akademi/diploma
17. Status kenelayanan: (Nelayan tetap/Nelayan sambilan utama)
18. Status di kapal :
 - Pemilik
 - Pekerja
 - Pemilik merangkap pekerja
19. Kelompok alat :
 - Jaring
 - Pancing
 - Pukat
 - Alat lainnya
20. Ukuran kapal :
 - Tanpa perahu
 - 0 < 10 GT
 - 10 – 30 GT
 - 0 > 30 GT
 - Perahu tanpa motor

21. Pendapatan per bulan : Rp....

22. No Telp/HP :

Permohonan pembuatan kartu nelayan diatur dalam PERMEN KP Nomor 16 tahun 2016 Bab V tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Nelayan Bagian Kesatu tentang Permohonan Penerbitan Kartu Nelayan ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Setiap nelayan untuk memiliki kartu nelayan harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan domisili dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Formulir permohonan penerbitan kartu nelayan yang telah diisi;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan; dan
 - d. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan telah lengkap dan sesuai, kepala dinas kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan kartu nelayan.

Dokumen yang dipakai oleh nelayan untuk pembuatan Kartu Nelayan adalah Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang menerangkan pekerjaannya adalah seorang nelayan. Sehingga tidak ada ukuran atau kriteria lain untuk nelayan dapat memiliki Kartu nelayan dan mendapatkan kebijakan lewat pemanfaatan Kartu Nelayan tersebut. Akib (2009) *dalam* Sartika, I (2011) secara teori, elemen–elemen berupa konsep, prosedur, proses, hasil dan manfaat berpengaruh terhadap kebijakan program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan sehingga dapat dirasakan efektif dalam pemetaan kebijakan apabila semuanya berjalan dengan baik, sehingga dampak dari program kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang signifikan dalam pencapaian sasaran di setiap kebijakan.

Dampak Program Kartu Nelayan.

Hasil analisis secara kuantitatif menunjukkan bahwa dampak langsung Program Kartu Nelayan dapat dilihat dalam beberapa kondisi. *Pertama*, jumlah bantuan alat tangkap atau sarana prasarana yang telah diserahkan kepada nelayan di kota Ambon dari tahun 2015–2017 (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah Bantuan Sarana Prasarana di Kota Ambon dari Tahun 2015–2017

No	Nama Alat Tangkap	T a h u n		
		2015	2016	2017
1	Purse Seine	1	2	-
2	Pancing Tonda	2	27	23
J u m l a h		3	29	23

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

Dalam pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan terjadi kenaikan pendapatan dari nelayan akibat dari sarana penangkapan yang lebih memadai sehingga adanya peningkatan trip penangkapan secara langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan volume produksi dan peningkatan penerimaan, demikian halnya dengan peningkatan volume produksi memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap peningkatan penerimaan nelayan.

Kedua, pada tahun 2016 terdapat program kebijakan pemerintah berupa Asuransi Nelayan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada setiap nelayan. Nelayan yang berhak mendapatkan Asuransi Nelayan adalah nelayan yang telah memiliki Kartu Nelayan direkomendasikan oleh masing-masing Dinas Perikanan Kabupaten/Kota (Tabel 3). Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerjasama dengan PT. Yasindo untuk mengakses program kebijakan pemerintah yaitu Asuransi Nelayan. Jumlah nelayan di Provinsi Maluku yang sudah mendapatkan Asuransi nelayan dari tahun 2016–2017 sebanyak 15.750 orang dan untuk Kota Ambon sebanyak 1.002 orang. Pemerintah Provinsi Maluku telah mengklaim asuransi kepada nelayan yang terkena musibah kecelakaan kerja di laut sebanyak 9 orang nelayan dengan total jumlah sebesar 1.328.000.000. *Ketiga*, Rekomendasi BBM Bersubsidi diberikan kepada nelayan yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan menyampaikan laporan produksi. Kerjasama antara Pemerintah dengan PT. Pertamina untuk dapat mengalokasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebanyak 70 ton per bulan dalam setahun diperkirakan sebanyak 840 ton.

Tabel 3. Penerima Asuransi Nelayan dari Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Jumlah Nelayan	Klaim Asuransi (orang)	Nilai (Rp)
		2016	2017			
1	Maluku Tengah	2.129	600	2.729	4	680.000.000
2	Maluku Tenggara	1.070	200	1.270	1	8.000.000
3	Maluku Tenggara Barat	613	1.000	1.613	-	-
4	Buru	1.080	100	1.180	-	-
5	Seram Bagian Timur	1.416	100	1.516	2	320.000.000
6	Seram Bagian Barat	1.467	1.000	2.467	-	-
7	Kepulauan Aru	589	700	1.289	2	320.000.000
8	Maluku Barat Daya	956	100	1.056	-	-
9	Buru Selatan	287	350	637	-	-
10	Kota Ambon	702	300	1.002	-	-
11	Kota Tual	491	500	991	-	-
Jumlah		10.800	4.950	15.750	9	1.328.000.000

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

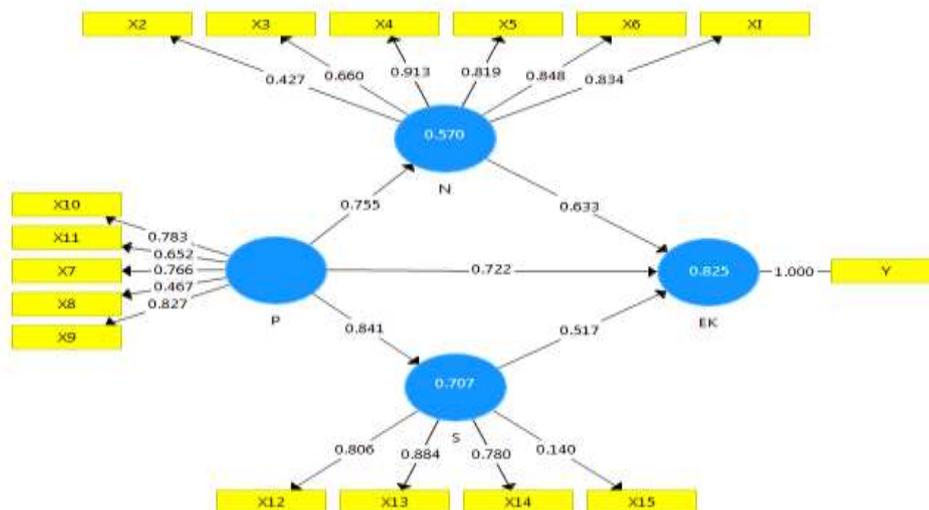
Nelayan kecil di Kota Ambon belum dapat merasakan manfaat dari pemberian BBM bersubsidi karena fasilitas SPDN di Kota Ambon belum dapat dioperasikan. Berdasarkan data yang diperoleh pengisian BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh nelayan menengah dengan menggunakan fasilitas SPDN di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Keempat, Program SeHAT Nelayan atau Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan untuk mengidentifikasi setiap nelayan pada suatu daerah yang belum memiliki sertifikat tanah sehingga dapat disertifikasi.

Rumusan Kebijakan Program Kartu Nelayan.

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui Peran Kartu Nelayan dalam mendukung usaha perikanan tangkap. Untuk itu dibutuhkan data statistik berupa data kualitatif dan kuantitatif dalam analisis ini. Dengan menggunakan analisis jalur maka dapat diketahui hubungan yang disebabkan oleh pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel-variabel dalam suatu model kausal, serta menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah

dirumuskan dengan menggunakan aplikasi Lisrel (Linear Structural RELationship) versi 8.80 (Gambar 2). Hasil uji validitas diagram jalur berdasarkan output algoritma pada gambar 2 juga dapat dilihat pada tabel 4.

Besaran nilai *loading* (λ) menunjukkan bahwa hubungan variabel indikator IN, P, RB, AN, SN, dan BS dengan Nelayan, hubungan variabel indikator DN, PBS, PAN, PSN, dan RBB dengan Pemerintah, hubungan variabel indikator KP, PP, PY, PB dan EK dengan *Stakeholders* memiliki nilai *loading* (λ) ≥ 0.5 dan memiliki nilai T Statistik > 1.96 pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$ (Tabel 4). Ukuran indikator dikatakan valid jika memiliki nilai *loading* (λ) dengan variabel laten yang diukur ≥ 0.5 apabila indikator yang diukur memiliki nilai *loading* (λ) < 0.5 maka indikator tersebut harus dikeluarkan karena mengindikasikan bahwa indikator tidak cukup baik sebagai pengukur variabel laten (Ghozali, 2006; Jaya & Sumertajaya, 2008; Hidayat, 2010). Pengujian kebaikan Diagram Jalur selanjutnya dinilai berdasarkan nilai *Composite Reliability*, AVE dan *Cronbach Alpha* (Tabel 5). Uji Kebaikan Diagram Jalur dilihat dari hubungan kausalitas antara variabel eksogen dan endogen (Tabel 6).



Gambar 2. Output PLS Algorithm Diagram Jalur Kartu Nelayan

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Indikator Pengukuran

Variabel		Loading (λ)	Sampel Mean	Standart Error	T Statistik
Nelayan	IN	0.834	0.834	0.844	18.763
	P	0.527	0.516	0.591	5.668
	RB	0.660	0.655	0.612	5.870
	AN	0.913	0.918	0.922	41.224
	SN	0.819	0.819	0.834	23.808
	BS	0.848	0.849	0.854	15.665
Pemerintah	DN	0.766	0.775	0.740	19.362
	PBS	0.576	0.561	0.516	5.013
	PAN	0.827	0.820	0.850	16.419
	PSN	0.783	0.777	0.757	13.670
	RBB	0.652	0.642	0.680	8.149
Stakeholders	KP	0.806	0.794	0.743	18.877
	PY	0.884	0.880	0.820	44.343
	PP	0.780	0.780	0.542	18.719
	PB	0.514	0.515	0.514	5.992
	EK	1.000	1.000	0.000	0.000

Sumber: Data Primer 2018 (output SmartPLS)

Tabel 5. Hasil Uji Kebaikan Diagram Jalur

Variabel	Composite Reability	AVE	Cronbach alpha	Keterangan
Efektifitas Kebijakan	1.000	1.000	1.000	Baik
Nelayan	0.846	0.892	0.590	Baik
Pemerintah	0.742	0.832	0.505	Baik
Stakeholder	0.782	0.779	0,515	Baik

Sumber: Data Primer 2018 (output SmartPLS)

Tabel 6. Hubungan Kausalitas Diagram Jalur

Hubungan Kausalitas	Koefisien Parameter	Standart Error	T Statistik
Nelayan-Efektifitas Kebijakan	0.633	0.159	1.986
Pemerintah-Efektifitas Kebijakan	0.722	0.188	2.137
Pemerintah-Nelayan	0.755	0.038	19.979
Pemerintah-Stakeholders	0.841	0.025	33.843
Stakeholders-Efektifitas Kebijakan	0.517	0.142	3.216

Sumber: Data Primer (output SmartPLS)

Pengaruh hubungan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Nelayan dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 0.633

- dengan nilai T-Statistik $1.986 > 1.96$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara nelayan dengan Efektifitas Kebijakan sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara variabel Nelayan dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 63%. Hal ini berarti semua indikator yang dipergunakan pada variabel laten eksogen dapat diterima karena berdasarkan data di lapangan Kartu Nelayan memberikan kemudahan bagi nelayan untuk dapat mengakses semua program pemerintah.
2. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Pemerintah dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 0.722 dengan nilai T-Statistik $2.137 > 1.96$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemerintah dengan Efektifitas Kebijakan sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara variabel Pemerintah dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 72%. Hal ini berarti semua indikator yang dipergunakan pada variabel laten eksogen dapat diterima berdasarkan data kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Program Kartu Nelayan.
 3. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Pemerintah dengan Nelayan sebesar 0.755 dengan nilai T-Statistik $19.979 > 1.96$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemerintah dengan Nelayan sehingga H_0 ditolak. Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan antara variabel Pemerintah dengan Nelayan sebesar 75%. Hal ini berarti semua indikator yang dipergunakan pada variabel laten eksogen dapat diterima dapat dilihat semua program yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai sangat efektif bagi nelayan.
 4. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel Pemerintah dengan *Stakeholders* sebesar 0.841 dengan nilai T-Statistik $33.843 > 1.96$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, menjelaskan terdapat

pengaruh yang signifikan antara Pemerintah dengan *Stakeholders* sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara variabel Pemerintah dengan Nelayan sebesar 84%. Hal ini berarti kerjasama antara pemerintah dan *stakeholders* berjalan baik dan *stakeholders* sangat mendukung program pemerintah untuk nelayan melalui berbagai fasilitas yang ada.

5. Koefisien parameter jalur yang diperoleh dari hubungan antara variabel *Stakeholders* dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 0.517 dengan nilai T-Statistik $3.216 > 1.96$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0.05$, menjelaskan terdapat pengaruh yang signifikan antara *Stakeholders* dengan Efektifitas Kebijakan sehingga H_0 ditolak. Berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara variabel *Stakeholders* dengan Efektifitas Kebijakan sebesar 51%. Hal ini berarti *stakeholders* dapat mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk nelayan dengan baik.

Sesuai dengan model analisis jalur yang dikembangkan, terpetakan beberapa hubungan atau dampak langsung, sebagai berikut:

- (1) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap Identitas Nelayan (IN) sebesar 0,834 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Identitas Nelayan sebesar 83,4%, sedangkan 16,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
- (2) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap Permodalan (P) sebesar 0,427 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Permodalan sebesar 42,7%, sedangkan 57,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
- (3) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap Rekomendasi BBM Bersubsidi (RB) sebesar 0,660 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Rekomendasi BBM Bersubsidi sebesar 66,0%, sedangkan 34,0% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
- (4) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap Asuransi Nelayan (AN) sebesar 0,913 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Asuransi Nelayan sebesar

- 91,3%, sedangkan 8,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
- (5) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap SeHAT Nelayan (SN) sebesar 0,819 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap SeHAT Nelayan 81,9%, sedangkan 18,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (6) Dampak langsung Nelayan (N) terhadap Bantuan Sarpras (BS) sebesar 0,848 yang mengandung arti pengaruh langsung Nelayan terhadap Bantuan Sarpras 84,8%, sedangkan 15,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (7) Dampak langsung Pemerintah (P) terhadap Data Nelayan (DN) sebesar 0,766 yang mengandung arti pengaruh langsung Pemerintah terhadap Data Nelayan sebesar 76,6%, sedangkan 23,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (8) Dampak langsung Pemerintah (P) terhadap Program Bantuan Sarpras (PBS) sebesar 0,467 yang mengandung Pemerintah (P) terhadap Program Bantuan Sarpras sebesar 46,7%, sedangkan 53,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (9) Dampak langsung Pemerintah (P) terhadap Program Asuransi Nelayan (PAN) sebesar 0,827 yang mengandung Pemerintah terhadap Program Asuransi Nelayan 82,7%, sedangkan 17,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (10) Dampak langsung Pemerintah (P) terhadap Program SeHAT Nelayan (PSN) sebesar 0,783 yang mengandung Pemerintah terhadap Program SeHAT Nelayan 78,3%, sedangkan 21,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (11) Dampak langsung Pemerintah (P) terhadap Rekomendasi BBM Bersubsidi (RBB) sebesar 0,652 yang mengandung Pemerintah terhadap Rekomendasi BBM Bersubsidi 65,2%, sedangkan 34,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (12) Dampak langsung *Stakeholders* (S) terhadap Kantor Pertanahan (ATR/BPN) (KP) sebesar 0,806 yang mengandung *Stakeholders* terhadap Kantor Pertanahan (ATR/BPN) 80,6%, sedangkan 19,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
 - (13) Dampak langsung *Stakeholders* (S) terhadap PT. Yasindo (PY) sebesar 0,884 yang mengandung *Stakeholders* terhadap PT. Yasindo 88,4%, sedangkan 11,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (14) Dampak langsung *Stakeholders* (S) terhadap PT. Pertamina (PP) sebesar 0,780 yang mengandung *Stakeholders* terhadap PT. Pertamina 78,0%, sedangkan 22% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain;
 - (15) Dampak langsung *Stakeholders* (S) terhadap Perbankan (PB) sebesar 0,140 yang mengandung *Stakeholders* terhadap Perbankan 14,0%, sedangkan 86% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.
- Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan terhadap Efektifitas Penggunaan Kartu Nelayan yang dapat ditingkatkan lagi baik oleh Pemerintah, Nelayan dan *Stakeholders* di Kota Ambon antara lain: *Pertama*, berdasarkan data Program Kartu Nelayan jumlah nelayan kota Ambon sebanyak 6.022 orang yang telah memiliki Kartu Nelayan adalah sebanyak 1.176 orang atau sekitar 19,52% dari jumlah nelayan hal ini disebabkan karena hanya nelayan penangkap yang diinput dalam aplikasi Kartu Nelayan, oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dimana kartu ini lebih dikenal dengan Kartu Kusuka. Kartu ini dapat digunakan semua pelaku usaha kelautan dan perikanan meliputi :
- a. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik;
 - b. Pembudidaya ikan terdiri dari pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;
 - c. Petambak garam terdiri atas petambak garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;
 - d. Pengolah ikan;
 - e. Pemasar perikanan; dan
 - f. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan, dan semua pelaku usaha

berbentuk orang perseorangan atau korporasi.

Kedua, rekomendasi BBM bersubsidi yang diberikan belum secara menyeluruh kepada semua nelayan kecil. Hal ini dikarenakan terbatasnya SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan) untuk kota Ambon sendiri hanya ada 1 (satu) dan belum dioperasikan. Oleh karena itu, pemerintah kota Ambon dapat bekerjasama dengan *Stakeholders* PT. Pertamina untuk dapat menambahkan SPBN di sentra produksi nelayan.

Ketiga, jaminan resiko nelayan penangkap ikan dan pelaku usaha dapat diminimalisir dengan adanya asuransi nelayan yang ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pemerintah Kota Ambon diharapkan dapat menjawab kuota penerima asuransi nelayan yang telah ditentukan dengan mengajukan nama-nama nelayan yang telah terinput dalam aplikasi PUPI KKP RI. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diharapkan tidak membatasi kuota penerima Asuransi Nelayan. Dalam Aplikasi PUPI, jumlah nelayan Kota Ambon yang sudah terinput dalam aplikasi PUPI sampai tahun 2018 sebanyak 1.176 nelayan, yang sudah terdaftar pada Asuransi Nelayan sebanyak 1002, diharapkan 174 nelayan yang belum terakomodir dapat diikutsertakan pada program Asuransi Nelayan pada tahun berikutnya. *Keempat*, dari data SeHAT nelayan kota Ambon terdapat 140 bidang tanah nelayan yang telah tersertifikat. Pemerintah melalui Dinas Perikanan Kota Ambon dapat mengajukan penambahan jumlah bidang tanah nelayan untuk disertifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil data analisis Trend, program Kartu Nelayan diminati oleh masyarakat nelayan di kota Ambon sejak tahun 2011 sampai dengan 2018 dengan jumlah pemilik Kartu Nelayan sebanyak 1.176 orang atau sekitar 19,52% dari jumlah nelayan di Kota Ambon.
2. Pemanfaatan Kartu Nelayan sangat efektif untuk nelayan dalam mengakses berbagai program kebijakan pemerintah dan memuat sejumlah informasi tentang nelayan dengan semua data diri tentang nelayan.
3. Dampak dan manfaat Kartu Nelayan khususnya untuk nelayan di kota Ambon telah dirasakan antara lain mendapat jaminan keselamatan kerja melalui program Asuransi Nelayan, memperoleh sertifikat tanah melalui program Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan). Selain itu memperoleh BBM bersubsidi hasil kerjasanama Pemerintah dengan PT. Pertamina.
4. Rumusan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kartu nelayan di kota Ambon berdasarkan hasil analisis hubungan kausalitas dan koefisien parameter antara Nelayan dengan Efektivitas Kebijakan dengan presentasi sebesar 63%, Pemerintah dengan Efektivitas kebijakan sebesar 72%, Pemerintah dengan Nelayan sebesar 75%, Pemerintah dengan *Stakeholders* dengan presentasi sebesar 84%, dan *Stakeholders* dengan Efektivitas Kebijakan dengan presentasi sebesar 51%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., Arifin, A. S., Harjito, D. A. 2008. Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum. *Jurnal Fenomena* 6(1).
- Alimul Hidayat A.A. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Jakarta. Heath Books.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia.
- Dye, Thomas. R. 1981. *Understanding Public Policy* (4th edition).Engelwood Cleff. Nj. Prentice-Hall Inc.Ltd.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Jaya, I Gede Nyoman Mindra., Sumertajaya, I Made. 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural*

- Dengan Partial Least Square*. Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- _____. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Masyuri, I., 2003. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. PMB-LIPI.
- Mubyarto, 2002. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta.
- Mulyadi S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.
- Petunjuk Teknis Kartu Nelayan tahun 2016
- Rambe. A. 2004., *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan*. Tesis. Pascasarjana IPB .Bogor.
- Sartika, I. 2011. Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11 (2): 111 -124.
- Sastrawidjaya. 2002. *Nelayan Nusantara*. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Schmidt, F. H dan Ferguson, J. H. A. 1951. *Rainfall Types Based On Wet and Dry Period Rations for Indonesia With Western New Guinea*. Jakarta: Kementrian Perhubungan Meteorologi dan Geofisika.
- Solichin, A. W. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang. Penerbit FIA. Universitas Brawijaya dan IKIP Malang.
- Steers R.M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta. Bandung.
- Widodo, S. 2011., “Strategi Nafkah Berkelanjutan bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir”. *MAKARA*. 15(1). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widodo, A. A. 2006. Efisiensi Teknis Kapal Pukat Cincin di Laut Jawa dan Sekitarnya yang Berbasis di PPN Pekalongan. *Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 3(2): 137-158.
- Wijayanti, L, dan Ihsanudin. 2013. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agriekonomika* 2(2) :139-152.
- Yafiz, M., Sondita, M. F. A., Soemakaryo, S., Monintja, D. R. 2009. Analisis Finansial Usaha Penangkapan Ikan Dalam Model Perbaikan Kesejahteraan Nelayan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan* 14 (1) : 81-92.
- Zuriat., 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Pada Kapal Motor 5-10 Gt Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Perikanan Tropis* Available online at: 3(1). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.